

## IMPLEMENTASI KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT BADUY

Elis Suryani Nani Sumarlina<sup>1</sup>, Rangga Saptia Mohamad Permana<sup>2</sup>, Undang Ahmad Darsa<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Departemen Sejarah dan Filologi, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Komunikasi Massa, Universitas Padjadjaran

Email: <sup>1</sup>elis.suryani@unpad.ac.id, <sup>2</sup>rangga.saptia@unpad.ac.id, <sup>3</sup>undang.a.darsa@unpad.ac.id

**ABSTRAK.** Setiap suku bangsa tentu memiliki kearifan lokal secara turun temurun, demikian halnya dengan masyarakat Sunda. Salah satunya yang masih eksis saat ini adalah sistem pemerintahan, kepemimpinan, dan pembagian kekuasaan, di masyarakat adat Baduy, yang dikenal dengan Tri Tangtu Di Buana, yakni Tiga kelembagaan yang memiliki kekuasaan dalam bidangnya masing-masing, yang terdiri dari Prebu, Rama, dan Resi. Ketiganya berkelindan erat dengan lembaga kapuunan (pemerintahan) masyarakat adat Baduy dan disebut Tangtu Telu, yang merepresentasikan tiga kapuunan yang mengatur kehidupan komunitas masyarakat adat Baduy, yakni Puun Ponggawa (Prebu) di Cibeo, Puun Rama di Cikeusik, dan Puun Resi di Cikartawana. Ketiga lembaga tersebut, membawahi beberapa jabatan yang berfungsi sebagai pembantu dan penyambung lidah, baik kepada masyarakat Baduy maupun untuk berurusan dengan pihak luar (pemerintah), yang terdiri atas puun, jaro tangtu, pangiwa, dan jaro pamaréntah; serta pemimpin tiap kampung, yaitu kokolot lembur. Keterjalinan lembaga dan jabatan di sana, membuka peluang terjadinya aktivitas komunikasi politik. Bagaimana implementasi komunikasi politik dalam lembaga kapuunan (pemerintahan) Baduy tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini, dengan menggunakan penelitian kualitatif, khususnya metode fenomenologi, melalui metode pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil menunjukkan bahwa implementasi komunikasi politik yang terjadi dalam proses penunjukan/pemilihan puun, jaro tangtu, jaro pamaréntah dan kokolot lembur dilaksanakan dan diterapkan dalam pemberian kuasa dan jabatan dalam berbagai konteks komunikasi, yaitu komunikasi antarpribadi dan komunikasi kelompok secara top-down dan bottom-up.

**Kata-Kata Kunci:** implementasi komunikasi politik; pemerintahan & kekuasaan; lembaga kapuunan; Tangtu Telu; masyarakat adat Baduy

### IMPLEMENTATION OF POLITICAL COMMUNICATION BASED ON LOCAL WISDOM OF BADUY INDIGENOUS COMMUNITIES

**ABSTRAK.** As is the case with the Sundanese, every ethnic group has indigenous knowledge that has been handed down from generation to generation. The governance and leadership system of Baduy, known as Tri Tangtu di Buana, still exists today. It consists of three institutions with authority in their respective fields: Prebu, Rama, and Resi. They are named Tangtu Telu, which represents the three kapuunan (government) institutions that govern the life of the Baduy indigenous community: Puun Ponggawa (Prebu) in Cibeo, Puun Rama in Cikeusik, and Puun Resi in Cikarawana. The puun, jaro tangtu, pangiwa, and jaro pamaréntah, as well as the overtime kokolot, are overseen by these three institutions. There are opportunities for political communication activities due to the intertwining of institutions and positions. The purpose of this study is to examine the implementation of political communication in Baduy kapuunan institutions using qualitative research, particularly phenomenological methods, and interview and observation data collection techniques. The results indicate that the implementation of political communication that occurs in the process of appointing/electing puun, jaro tangtu, jaro pamaréntah, and kokolot lembur is carried out and applied in the granting of power and positions in various communication contexts, namely interpersonal communication, top-down interpersonal communication, and bottom-up interpersonal communication.

**Keywords:** Implementation of Political Communication; Governance & Power; Kapuunan Institution; Tangtu Telu; Baduy Indigenous People

## PENDAHULUAN

Nenek moyang orang Sunda menyumbangkan berbagai ilmu pengetahuan melewati kearifan lokal budayanya, baik aksara, bahasa, sastra, seni, pandangan hidup, dan ilmu pengetahuan lainnya, yang tertuang dalam berbagai naskah Sunda kuno. Kearifan lokal yang masih eksis dan diimplementasikan sampai saat

ini adalah sistem pemerintah dan pembagian kekuasaan yang masih dilakukan oleh masyarakat adat Baduy, melalui tiga kelembagaan yang masing-masing daripadanya memiliki tugas yang berbeda satu sama lain, yang tentu saja memiliki kekuasaan berbeda pula dalam bidangnya masing-masing. Model pembagian atau sistem pemisahan kekuasaan tradisional masyarakat Sunda beserta aturan-

aturan lainnya yang masih tampak sampai saat ini di masyarakat adat Baduy tersebut, cukup jelas digambarkan dalam teks naskah *Fragmen Carita Parahyangan (FCP)*, yang ditulis abad ke-16 M), yang berbeda dengan teks naskah *Carita Parahyangan* yang lebih dikenal sebelumnya.

Sistem pembagian kekuasaan di masyarakat adat Baduy, yang masih dimanifestasikan, membuktikan bahwa segala sesuatu tidak semata-mata ditentukan oleh seorang *Prebu* (eksekutif, dalam sistem pemerintahan saat ini), sebagai pemegang pemerintahan tertinggi yakni presiden, namun dilakukan atas kesepakatan dengan pihak *Rama* (legeslatif/DPR) dan pihak *Resi* (yudikatif/MA dan jajaran pemegang hukum), yang tidak saling mengintervensi. Sistem pembagian kekuasaan *Prebu-Rama-Resi* inilah yang disebut dengan istilah *Tri Tangtu Di Buana* (tiga golongan yang menentukan roda kekuasaan & pemerintahan di dunia) (Sumarlina, 2010; Darsa, 2009, Charliyan, Permana, 2015: Charliyan, 2015).

Sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan yang masih diimplementasikan di masyarakat Sunda (khususnya di Baduy) harus dibagi-bagi sedemikian rupa sehingga yang satu terpisah dari yang lainnya. Hal ini sangat beralasan, agar kekuasaan dan pemerintahan tidak terpusatkan pada satu tangan (*prebu*/raja, eksekutif) semata. Melalui pembagian dan pemisahan kekuasaan-kekuasaan itu dapatlah dicegah tindakan-tindakan penguasa secara sewenang-wenang dan kebebasan berpolitik dalam pemerintahan akan lebih terjamin. Lewat *Tri Tangtu Di Buana* inilah yang banyak terjadi kegiatan implementasi komunikasi politik, yang di dalamnya mengandung aspek-aspek komunikasi politik antarpemegang kekuasaan. Implementasi Komunikasi Politik, berbasis kearifan lokal yang ada di Baduy, melalui aspek-aspeknya terwujud dalam aktivitas komunikasi politik yang terjadi dalam peristiwa pembagian/pemisahan kekuasaan dan pembagian wilayah kekuasaan yang sama dengan sistem Kerajaan Sunda masa lampau, yang memang masih diimplementasikan sampai saat ini di masyarakat adat Baduy. *Tri Tangtu Di Buana* masih diimplementasi serta diwujudkan dalam sebuah lembaga *kapuunan* (pemerintahan) masyarakat adat Baduy yang bernama *Tangtu Telu* (Sumarlina, 2010 & 2016: Permana, 2015).

Berkaitan dengan masalah komunikasi politik dalam masyarakat, Mark Roelofs dan Barn Lund menyatakan bahwa "*Politics is talk or to put the matter, more exactly the activity of politics (politicking) is talking*". Sementara itu, Nimmo merumuskannya sebagai kegiatan yang

bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial, yang menata perilaku dalam kondisi konflik (Ardial, 2010). Dari ungkapan tersebut, tersirat bahwa komunikasi politik lebih memusatkan kajiannya pada bobot materi muatan yang berisi pesan-pesan politik (isu politik, peristiwa dan perilaku politik individu-individu, baik sebagai penguasa maupun yang berada dalam asosiasi-asosiasi kemasyarakatan atau asosiasi politik) (Harun & AP., 2006).

Komunikasi politik bersifat "tidak bebas nilai" yang sangat terkait dengan faktor sejarah dan kultural (Nurussaadah & Sumartias, 2017). Berkaitan dengan masalah ini, Nimmo membagi komunikator politik menjadi 3 jenis, yakni politikus, profesional, dan aktivis (Nimmo, 2005). Pesan komunikasi politik adalah pesan yang berkaitan dengan peran negara dalam melindungi semua kepentingan masyarakat (warga negara). Pesan yang disampaikan dapat berupa keputusan, kebijakan dan peraturan, yang menyangkut kepentingan dari keseluruhan masyarakat, bangsa dan negara. Pesan yang disampaikan bisa disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi. Tentang saluran dimaksud, ada tiga tipe utama, yaitu saluran massa, interpersonal, dan organisasi (Nimmo, 2005).

Implementasi komunikasi politik praktiknya dilaksanakan, barang siapa yang mengawali komunikasi, dialah yang merupakan indikator kekuasaan. Dalam implementasinya, siapa yang menempatkan manusia pada posisi yang lebih rendah adalah suatu wujud pelaksanaan kekuasaan. Tinggi rendahnya suatu komunikasi politik, itu bersifat positif, dalam pengertian, bahwa ia dapat mencapai tujuan dan dapat menyelesaikan masalah-masalahnya. Foucault menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan menciptakan pengetahuan baru dan sekumpulan informasi. Kekuasaan adalah suatu kekuatan positif bila dibagikan, dikembangkan pada orang lain, dan digunakan secara bijaksana. Kekuasaan berhubungan erat dengan komunikasi, karena komunikasi memiliki kemampuan untuk menentukan hasil-hasil: pengetahuan, keyakinan, dan tindakan. Komunikasi adalah mekanisme pelaksanaan pengaruh (kekuasaan) (Pace & Faules, 2006).

Kekuasaan termaktub dalam kepemimpinan; dan konsep kepemimpinan masyarakat Sunda tertuang dalam konsep *parigeuing* (Sumarlina & Permana, 2019); (Permana et al., 2020). Komunikasi politik dan kekuasaan juga terimplementasikan dalam tatanan masyarakat adat, salah satunya adalah masyarakat adat Baduy. Masyarakat Baduy atau dikenal dengan sebutan *Urang Baduy* adalah

sekelompok orang Sunda yang berdiam di satu desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Masyarakat adat Baduy, bertempat tinggal di Desa Kanekes, yang terletak kira-kira 60 km di sebelah selatan Kota Rangkasbitung, ibu kota Kabupaten Lebak. Desa Kanekes didiami oleh *urang* Baduy atau orang Baduy, terbagi atas Baduy Dalam dan Baduy Luar serta masyarakat Luar Baduy. Di Desa Kanekes tidak terdapat kelompok etnik Indonesia lainnya sehingga warga masyarakat Baduy di desa itu merupakan suatu masyarakat yang relatif homogen. Orang Baduy membagi diri ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok *Tangtu* atau Baduy Dalam (tiga buah kampung) dan kelompok *Panamping* atau Baduy Luar (kira-kira terdapat 26 buah kampung di Desa Kanekes, yang kini jumlahnya lebih). Adapun luas desa itu 5 ha dengan jumlah penduduk 4.574 orang, atau 1.165 kepala keluarga (KK) yang mendiami 1.075 rumah (Garna, 2009).

Tiga kampung *tangtu* di atas merupakan representasi dari *Tangtu Telu*, di mana terdapat tiga *kapuunan* yang mengatur kehidupan komunitas masyarakat adat Baduy. Ketiganya adalah *Puun Ponggawa (Prebu)* di Cibeo, *Puun Rama* di Cikeusik, dan *Puun Resi* di Cikartawana. Ketiga *puun* tersebut sering disebut dengan tritunggal, artinya ketiga orang tersebut memegang satu keputusan (Arif et al., 2021). *Puun* Cikeusik dipercaya sebagai *puun* tertua, dan terletak paling dalam (paling selatan) di antara ketiga kampung *tangtu* yang terdapat di Baduy. *Puun* termuda adalah *Puun* Cibeo, dan terletak paling luar di antara ketiga kampung *tangtu*. Sedangkan yang mengantarainya adalah *Puun* Cikartawana. Oleh karena itu, pusat dari kegiatan-kegiatan duniawi dipusatkan di Cibeo, dan sebaliknya, *Puun* Cikeusik cenderung sangat sedikit terpengaruh hal-hal duniawi.

Masyarakat Baduy adalah masyarakat adat yang senantiasa taat dan teguh memegang adat istiadat leluhurnya. Mereka masih memegang teguh tradisi "*pikukuh*" yang diwarisi oleh nenek moyang mereka secara turun temurun (AS et al., 2020). Dalam dinamika budaya masyarakat Baduy, *pikukuh* relatif bertahan kuat pada masyarakat Baduy Dalam (*tangtu*), namun melonggar pada masyarakat Baduy Luar (*panamping*) (Amaliyah, 2018). Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat Baduy harus lebih kuat lagi membentengi diri dari pengaruh luar, terutama masyarakat yang berbatasan dengan Ciboleger, yang semakin ramai dan dipenuhi dengan beragam adat budaya dari luar.

Sebagai kelompok etnis, Baduy dikenal dengan perlawanannya terhadap modernitas, mempertahankan kehidupan terpencil tanpa menggunakan segala bentuk teknologi modern (Heriyanto et al., 2019). Bahkan, di Baduy Dalam (*Kampung Tangtu*), alat makan dan minum yang terbuat dari gelas, plastik dan barang-barang rumah tangga lainnya yang berasal dari luar dilarang digunakan (Syarbini, 2015). Mereka juga tidak boleh naik kendaraan dan tidak boleh memakai sandal, serta berjalan kaki ke manapun mereka pergi (Ahidin et al., 2018). Masyarakat Baduy sebagai *indigenous people* memang memiliki daya tarik, baik dari segi budaya maupun alam (Sobarna & Afsari, 2020).

Berdasarkan paparan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi komunikasi politik dalam lembaga *kapuunan* (pemerintahan) Baduy sesuai dengan adat, tradisi, serta religi, dan kearifan lokal masyarakatnya. Fokus dari penelitian ini ada dalam bahasan mengenai proses penunjukkan/pemilihan *puun*, *jaro tangtu* (*kokolotan*), *jaro pamaréntah* dan *kokolot lembur*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, tepatnya metode fenomenologi, yang menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan di mana pengalaman dan pengaruh itu berasal. Dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna, dan kesadaran (Kuswarno, 2009). Observasi dan wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam untuk penulisan artikel ini.

Tulisan ini mengacu kepada hasil penelitian yang dilakukan di Baduy beberapa kali, bukan hanya khusus untuk tulisan ini, tapi juga kearifan lokal masyarakat Baduy lainnya, yang tidak dipisahkan dari komunikasi politik yang dilakukan masyarakatnya. Namun, untuk masalah ini, Kami melakukan observasi partisipasi pasif, artinya hanya berperan sebagai pengamat, karena penulis sendiri adalah *outsider* yang bukan merupakan anggota masyarakat adat Baduy; jadi kami mengamati sealamiah mungkin apa saja yang dilakukan dan dikatakan oleh subjek pengamatan. Hal-hal yang telah diamati oleh penulis adalah tindakan, perilaku, dan perkataan/tuturan yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang menonjolkan aktivitas komunikasi politik para pemimpin di lembaga *kapuunan* Baduy.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua metode wawancara, yaitu wawancara pembicaraan informal dan wawancara mendalam. Wawancara pembicaraan informal dilakukan secara tidak terstruktur kepada *urang* Baduy untuk menggali informasi mengenai kegiatan dan implementasi komunikasi politik yang dilakukan oleh para pemimpin di Baduy. Kami pun memberikan pertanyaan-pertanyaan secara alamiah, di samping sadap rekam (yang disembunyikan/tanpa diketahui yang disimpan di balik jaket, karena kalau ketahuan, mereka tidak akan berbicara) kepada beberapa orang penduduk Baduy, sesuai alur pembicaraan, sehingga narasumber tidak akan menyadari kalau ia sedang diwawancarai. Dalam proses wawancara, kami sebisa mungkin menangkap kata-kata kunci yang berhubungan dengan penelitian. Setelah perbincangan selesai, barulah dilakukan proses pencatatan wawancara.

Yang menjadi Narasumber dalam kegiatan pemupuan data ini adalah penduduk masyarakat Baduy, terutama penduduk yang mengetahui seluk-beluk *Tangtu Telu* (*Tri Tangtu Di Buana* Baduy). Mereka adalah penduduk yang rumahnya kami tinggali untuk bermalam/disewa), yakni Ayah Cudih dan Asmin (anaknya) dari Kampung Cijengkol serta Ayah Sarjaya dan Aki Jahadi dari Kampung Cikartawana. Antara kampung Cijengkol dan Cikartawana, tempatnya lumayan jauh. Wawancara tersebut dilakukan dengan metode pembicaraan informal yang tidak terstruktur. Pengecualian dilakukan pada Ayah Cudih sebagai informan utama, karena beliau merupakan salah satu *kolot* di Baduy dan bersedia diwawancarai secara formal dengan metode wawancara mendalam dan cukup lama di rumah yang kami tinggali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pembagian kekuasaan yang dikenal dengan *Tri Tangtu Di Buana* tercermin dari tiga *kapuunan* di masyarakat adat Baduy, yakni *Puun* Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Ketiga *kapuunan* dimaksud disebut dengan *Tangtu Telu*. Dapat dikatakan bahwa *Tangtu Telu* merupakan representasi *Tri Tangtu Di Buana* di masyarakat adat Baduy. Saat ini, di Baduy pun tercermin dan diimplementasikan beberapa pemilihan pejabat internal yang melibatkan *Tri Tangtu Di Buana*. Kegiatan ini juga mengandung aspek-aspek implementasi komunikasi politik di dalamnya.

Apa saja kelembagaan yang ada di masyarakat adat Baduy? Tampaknya sebelum membahas implementasi komunikasi politik

dalam kegiatan pemilihan pejabat kelembagaan di masyarakat adat Baduy, ada baiknya kami jelaskan mengenai kelembagaan yang ada di Baduy, agar lebih memahami masalahnya.

Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa di masyarakat adat Baduy dikenal tiga lembaga yang bersama-sama memimpin dan menjalankan tata pemerintahan di Baduy yang jamak, dikenal dengan istilah *Tangtu Telu*, yang masing-masing memegang wilayah berikut sebutannya, yakni: *Kapuunan* Cibeo (*Puun Prebu/ Ponggawa*), *Kapuunan* Cikartawana (*Puun Resi*), dan *Kapuunan* Cikeusik (*Puun Rama*). Di bawah ketiga lembaga tersebut, terdapat juga beberapa jabatan yang berfungsi sebagai pembantu dan penyambung lidah atau *mediator*, baik kepada masyarakat Baduy itu sendiri maupun untuk berurusan dengan pihak luar (pemerintah). Beberapa jabatan penting di dalam lembaga *kapuunan* dalam pemerintahan masyarakat adat Baduy, yakni:

***Puun*.** *Puun* dalam sistem pemerintahan masyarakat adat Baduy adalah jabatan tertinggi dalam wilayah *Tangtu* meliputi (*Puun* Cibeo, *Puun* Cikartawana, dan *Puun* Cikeusik). Mereka Para *Puun* tidak hanya memimpin di kampung *tangtu* mereka sendiri, tetapi juga memimpin rakyat Baduy secara keseluruhan. Berdasarkan adat, tradisi, dan peraturan yang berlaku (*pikukuh*), jabatan *puun* tersebut diwariskan secara turun-temurun (genealogis), kecuali apabila ada hal lain yang tidak memungkinkan terjadinya pewarisan jabatan secara genealogis dimaksud. Jika hal ini terjadi, jabatan *puun* bisa diwariskan kepada kerabat dekatnya. Panggilan kehormatan untuk jabatan *puun* adalah “*girang*”.

***Jaro Tangtu (Kokolotan)*.** Kelaziman sesuai dengan sistem yang berlaku di masyarakat Baduy, setiap *puun* mempunyai seorang *jaro tangtu* yang menjadi tangan kanan dan wakilnya dalam pelaksanaan harian urusan pemerintahan *kapuunan*. Tugas wakil meliputi segala macam urusan yang menyangkut *puun* dan mereka memiliki tugas terberat dibandingkan dengan pejabat yang lainnya. Andai ditelusuri, sebenarnya merekalah ujung tombak implementasi komunikasi politik *puun*, karena tugas utama mereka adalah sebagai juru bicara dan kurir dalam menyampaikan pesan-pesan yang telah diberikan *puun* kepada masyarakat Baduy secara luas. Merekalah yang pergi kesana-kemari untuk menyampaikan pesan tersebut, sekaligus juga sebagai penyambung lidah masyarakat Baduy kepada *puun*. Mereka juga turut berkoordinasi dengan *jaro pamaréntah* untuk urusan luar (pemerintah pusat) dan dengan



para *kokolot lembur* sebagai pemimpin di desa *panamping*.

**Jaro Pamaréntah**, Ia dalam sistem pemerintahan masyarakat adat Baduy berperan sebagai Pimpinan formal Desa Kanekes disebut *jaro pamaréntah*. Orang yang mengemban jabatan ini bertugas untuk berhubungan dengan pihak luar, khususnya dengan pemerintah daerah/provinsi. Secara hierarkis, ia berada di bawah camat, namun dalam urusan adat, tradisi, dan religi, ia tunduk pada tiga *puun*. Calon *jaro* Desa Kanekes ini wajib mendapatkan restu dari ketiga *puun* sebelum diajukan kepada Bupati Lebak (melalui camat) untuk dikukuhkan sebagai kepala desa. Karena *jaro pamaréntah* harus berasal dari masyarakat Baduy asli, maka ia tabu menulis. Kegiatan tulis-menulis dilakukan oleh juru tulis/sekdes (*carik*) yang diambil dari orang non-Baduy (orang luar).

**Kokolot Lembur**. Ia Dalam sistem pemerintahan masyarakat adat Baduy adalah ketua/penanggung jawab pemerintahan di tiap kampung *panamping*. Kriteria orang yang memegang jabatan ini harus benar-benar dapat “*dipikolot/dituakan*” atau harus mampu bersikap seperti orang tua oleh warganya. *Kokolot lembur* juga bertugas untuk menikahkan dua sejoli yang hendak menikah (berperan sebagai penghulu). Ia juga menyimpan alat-alat untuk upacara-upacara adat, tradisi, dan yang berhubungan dengan religi yang rutin dilakukan di masyarakat adat Baduy.

*Puun, jaro tangtu, pangiwa, jaro pamaréntah* dan *kokolot lembur*, semuanya adalah lembaga-lembaga yang ada di dalam lembaga *kapuunan* masyarakat Baduy. Implementasi komunikasi politik dalam sistem pemerintahan masyarakat adat Baduy, dapat dilihat dari proses pemilihan dan penunjukkan beberapa pejabat dalam lembaga *kapuunan* di Baduy, yang harus dan wajib dilakukan dalam sistem pemerintahan masyarakat adat Baduy, sebagaimana disajikan berikut ini.

**Proses Penunjukkan Puun**. Implementasi komunikasi politik dalam proses penunjukkan *puun* di Baduy bisa dikatakan memiliki sebuah cara yang unik, langka, dan berbau mistis/magis. Berdasarkan hasil wawancara yang kami sarikan dari para informan, yaitu Ayah Cudih (62) dan Asmin (38) yang keduanya warga Kampung Cijengkol, serta Aki Jasih (65) dan Ayah Sarjaya (60) *kolot* di Cikartawana, implementasi terjadinya proses komunikasi politik terjadi melalui beberapa tahap, seperti yang tertuang dalam kutipan hasil wawancara di bawah ini (telah dialihbahasakan menjadi Bahasa Indonesia, karena pada saat wawancara, penulis

menggunakan Bahasa Sunda dengan dialek Banten):

Implementasi komunikasi politik dalam “Proses penunjukkan *puun* di masyarakat Baduy diawali oleh peristiwa “kesurupan arwah leluhur/*karuhun*” yang dialami salah satu warga kampung *tangtu*. Orang yang mengalami kesurupan tersebut tidak tentu jenis kelamin dan usianya, bisa siapa saja, dari kalangan apa saja, pekerjaan apa saja, baik itu laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa. Peristiwa kesurupan ini pun bisa terjadi kapan saja, meskipun durasi menjabat *puun* yang lama belum terlalu lama (tidak dibatasi waktu). Setelah mengalami peristiwa kejadian kesurupan tersebut, biasanya para warga berkumpul di tempat kesurupan, lalu membawa orang yang kesurupan itu ke rumah *puun* dan memanggil orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan *puun*, misalnya adik dan kakak beserta anak-anaknya. Setelah semuanya berkumpul, orang yang kesurupan ini kemudian menunjuk siapa yang selanjutnya menjadi *puun*.” Siapapun yang ditunjuk, itu tidak bisa diganggu gugat.

Jabatan *Puun*, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa jabatannya (*puun*) ini diturunkan secara genealogis (dan harus berjenis kelamin pria), jadi sudah dapat dipastikan jika yang menjadi *puun* selanjutnya adalah anak dari *puun* sebelumnya. Tetapi anak sulung dari *puun* belum tentu langsung menjadi *puun*, karena anak tengah dan anak bungsu pun bisa ditunjuk menjadi *puun* bila *puun* tersebut memiliki lebih dari satu anak. Tetapi jika hanya memiliki anak tunggal, biasanya anak semata wayangnya yang dipilih.

Ada kasus menarik yang terjadi dalam proses implementasi komunikasi politik pemilihan *puun* di masyarakat adat Baduy ini. Apabila *puun* sebelumnya tidak memiliki anak laki-laki, maka yang selanjutnya menjabat sebagai *puun* adalah anak laki-laki dari kakak atau adik *puun* tersebut (dengan kata lain keponakan laki-lakinya). Karena di Baduy, seorang lelaki yang belum memiliki anak tidak diperkenankan memegang jabatan dalam kelembagaan *puun*, baik itu menjabat sebagai *jaro tangtu, kokolot lembur, atau jaro pamaréntah*.

Jika proses penunjukkan *puun* selesai, yang penuh dengan terjadinya komunikasi politik, tidak lama kemudian, orang yang kesurupan pun sadar. Hasil dari proses pemilihan *Puun* tersebut sebagaimana dijelaskan

sebelumnya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, karena masyarakat Baduy percaya bahwa penunjukan *puun* ini langsung berasal dari *karuhun* 'nenek moyang', oleh karena itu, mereka pasti menerimanya dengan suka cita. Orang yang ditunjuk menjadi *puun* ini pun selalu berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, karena itu tidak pernah ada rasa tidak puas dari masyarakat Baduy, sehingga tidak pernah ada kudeta atau tuntutan mundur dari masyarakat adat Baduy kepada *puun* yang sedang menjabat.

Dalam sistem pemerintah masyarakat adat Baduy, tidak ada pembatasan waktu dan durasi menjabat untuk para *puun* tersebut. Maka dari itu, waktu atau durasi jabatan *puun* pun tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara, durasi terpendek menjabat seorang *puun* adalah 8 tahun, yang terjadi di Cikeusik. Sedangkan durasi terlama adalah 25 tahun, yang terjadi di Cikeusik juga. Dari segi usia, usia 35 tahun adalah usia termuda seseorang pernah ditunjuk menjadi *puun*, sedangkan yang tertua berusia 50 tahun saat ia ditunjuk menjadi seorang *puun*, dan keduanya terjadi di Cibeo. Rentang usia orang yang ditunjuk menjadi *puun* berkisar antara usia 35-50 tahun (Permana, 2015).

Implementasi komunikasi politik dalam sistem pemerintahan masyarakat adat Baduy, yang dimanifestasikan dalam proses penunjukan *puun* ini terjadi pada saat orang yang kesurupan arwah *karuhun* menunjuk *puun* baru. Orang yang kesurupan ini juga sering memberi wejangan dan alasan-alasan dipilihnya seseorang menjadi *puun*. Karena menyangkut peristiwa politik, yaitu penunjukan orang yang akan menduduki tampuk kekuasaan, maka proses ini termasuk ke dalam salah satu implementasi aktivitas komunikasi politik.

**Proses Penunjukan Jaro Tangtu.** Di masyarakat adat Baduy, *Jaro tangtu* juga lazim disebut sebagai *kokolotan*. Proses pemilihan *Jaro tangtu*, tidak sama seperti penunjukan *puun* yang dilakukan *karuhun* secara langsung melalui peristiwa kesurupan, *jaro tangtu* dipilih oleh *puun* secara langsung. *Jaro Tangtu* Cibeo dipilih oleh *Puun* Cibeo, begitu pula di dua kampung *tangtu* lainnya. Menurut hasil wawancara dengan informan, ada beberapa kriteria penting yang harus dimiliki oleh calon *jaro tangtu*. Seperti dalam petikan wawancara dengan Ayah Cudih berikut ini:

"Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang *jaro tangtu* adalah sehat jasmani dan rohani, memiliki kondisi fisik dan stamina yang baik, berdedikasi, tinggi, dipercaya masyarakat, dan mampu

berkomunikasi dengan seluruh golongan dan masyarakatnya."

Peran dan fungsi *jaro tangtu* dalam sistem tatapemerintahan kelembagaan *puun* di masyarakat adat Baduy yang sangat penting, maka *puun* tidak pernah sembarangan dalam memilih *jaro tangtu*, yang akan menjadi tangan kanan, penyambung lidah, menjalankan fungsi hubungan masyarakat, dan medianya dalam menyampaikan pesan-pesannya. Seorang *jaro tangtu* utamanya harus memiliki fisik dan stamina yang kuat, karena ia harus mampu berkeliling ke seluruh kampung di Baduy, jika ada hal atau pesan penting dari para *puun*, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat Baduy secara luas.

Kondisi jarak antarkampung di Baduy bisa dikatakan jauh satu sama lain. Keadaan lembah, hutan, bukit, bahkan juga ada tumpukan batu yang harus dipanjat dan dituruni, dilalui serta wajib dilewati apabila ingin bepergian dari satu kampung ke kampung lainnya di Baduy. *Jaro tangtu* juga harus memiliki kecerdasan yang mumpuni dalam mencerna pesan-pesan pemerintah yang diterimanya, karena seorang *jaro tangtu* juga berperan sebagai medium komunikasi bagi para *puun*, *jaro pamaréntah*, dan para *kokolot lembur*. Selain harus memiliki kecerdasan dalam memaknai pesan, ia juga harus memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan pesan-pesan agar dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicaranya. Dalam hal ini, komunikasi politik sangat berperan. Jika terjadi kesalahpahaman akan berakibat kurang baik.

Jabatan *jaro tangtu*, tergantung kepada *puun*. Bila *puun* berganti, *jaro tangtu* juga bisa ikut diganti, karena seorang *jaro tangtu* biasanya adalah orang kepercayaan *puu*, dalam arti pemilihannya berdasarkan perasaan subjektif *puun*. Tetapi bila *puun* baru merasa cocok dan percaya pada *jaro tangtu puun* sebelumnya, *puun* baru tersebut tidak akan menggantinya. Seorang *jaro tangtu* juga bisa mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada *puun* bila ia sudah tidak mampu memegang jabatannya tersebut.

Hasil wawancara, alasan mundurnya seorang *jaro tangtu* umumnya karena ia sudah tidak kuat lagi secara fisik, karena setiap ada pesan dari *puun*, ia harus berjalan puluhan kilometer, dengan medan yang turun, naik, terjal, dan kurang baik untuk dilalui, untuk menyampaikannya kepada masyarakat Baduy di tiap kampung, baik itu kampung *panamping* maupun kampung *tangtu*.

Aspek komunikasi politik yang terkandung di dalam proses penunjukan *jaro*

*tangtu* ini terwujud dalam aktivitas komunikasi politik ketika *puun* memberikan jabatan kepada orang yang akhirnya didapuk menjadi *jaro tangtu*. Komunikasi politik yang berlangsung bersifat *face-to-face* dan dihadiri oleh para warga berpengaruh di kampung *tangtu* tersebut. Karena menyangkut pemerintahan dan pemberian kuasa, maka proses ini termasuk mengimplementasikan aktivitas komunikasi politik.

#### **Proses Penunjukkan Jaro Pamaréntah.**

Untuk menunjuk Calon *jaro pamaréntah* (calon Kepala Desa Kanekes) dalam sistem pemerintahan masyarakat adat Baduy, terlebih dahulu harus mendapatkan restu dari ketiga *puun*. Jika sudah ada restu, barulah dapat diajukan ke bupati (melalui camat) untuk dikukuhkan sebagai kepala desa. Dengan kata lain, bila para *puun* menilai pekerjaannya memuaskan, maka *jaro pamaréntah* tersebut dapat terus menjabat. Seperti *jaro pamaréntah* sekarang yang sangat dipercayai oleh para *puun* di Baduy dalam waktu hampir seperempat abad. Seperti yang tertuang dalam kutipan wawancara bersama Asmin berikut ini:

“*Jaro Dainah*, yang sangat dipercayai oleh para *puun*, Ia telah menjadi kepala desa selama lima periode, atau kurang lebih 25 tahun, bisa lama memegang tampuk jabatannya karena para *puun* merasa puas dengan pekerjaannya sebagai jembatan penghubung antara masyarakat adat Baduy dengan pihak pemerintah Lebak Banten. Para *Puun* mempercayainya sepenuh hati.”

*Jaro Dainah* menjabat sangat lama karena sangat dipercaya oleh para *Puun*. Beberapa *jaro pamaréntah* yang menjabat pada periode sebelumnya, di antaranya *Jaro Pulung*, *Jaro Asrap*, dan *Jaro Nakiwin*. Ada *Jaro pamaréntah* yang diberhentikan dan diganti, karena kurang disukai oleh para *puun* pada saat ia menjabat, yakni *Jaro Asrap*. Sementara itu, *Jaro Pulung* dan *Jaro Nakiwin* diganti karena meninggal pada saat menjabat. Informasi lainnya, hingga saat ini, *Jaro Dainah* adalah *jaro pamaréntah* terlama yang pernah menjabat di daerah Baduy.

Hampir sama seperti pada proses penunjukkan *jaro tangtu*, implementasi komunikasi politik di masyarakat adat Baduy yang terwujud melalui aktivitas komunikasi politik yang terkandung dalam proses ini terjadi ketika para *puun* memberi restu kepada calon *jaro pamaréntah* untuk menjabat sebagai Kepala Desa Kanekes. *Jaro pamaréntah* diberikan wewenang dan kuasa untuk menjembatani Baduy dengan pihak luar, dalam hal ini pemerintah. Jadi,

para *puun* memberikan dia kedaulatan sebagai pemimpin wilayah Baduy yang bersifat formal, dalam hal ini menjabat sebagai Kepala Desa Kanekes.

#### **Proses Pemilihan Kokolot Lembur.**

Pemilihan *kokolot lembur* dalam sistem pemerintahan *Kapuunan* masyarakat adat Baduy, para *puun* tidak terlibat secara langsung. Pemilihan *kokolot lembur* diserahkan pada warga kampung *panamping*, yang berhak menentukan pemimpin mereka. Penentuan *kokolot lembur* ini tidak dilakukan dengan cara voting, tetapi melalui musyawarah yang dilakukan para *kolot* yang terdapat di kampung *panamping* yang hendak memilih *kokolot lembur* tersebut.

Proses pemilihan *kokolot lembur*, dilakukan dengan cara, para *kolot* atau para warga yang dituakan berkumpul di suatu tempat (bisa di rumah siapa saja, tergantung kesepakatan bersama), lalu mereka berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain untuk menentukan siapa calon *kokolot lembur* yang akan disertai jabatan. Jadi, sama seperti para *puun*, dalam proses pemilihan *kokolot lembur* ini, para *kolot* melakukan *gempungan* ‘diskusi’ yang sebagai perwujudan implementasi komunikasi kelompok.

Implementasi aktivitas komunikasi politik, dimulai dari situ. Dalam pelaksanaan *gempungan* ‘diskusi’, hampir tidak pernah terjadi silang pendapat antarpara *kolot* dalam proses pemilihan ini. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, biasanya pendapat *kolot* tertua dan paling dihormati yang akan diambil, istilahnya “*milu ka nu kolot*”. Selain itu, salah satu bentuk pengaruh struktur adat terhadap cara masyarakat Baduy berkomunikasi politik adalah adanya nilai adat berupa “*lunang*” atau “*milu ka nu meunang*” (ikut pada yang menang) (Mahpudin, 2020). Setelah *kokolot lembur* ini terpilih, ia akan melapor ke para *puun* melalui *jaro tangtu*. Jadi, implementasi aktivitas komunikasi politik yang terjadi bersifat *bottom-up*.

## **SIMPULAN**

Implementasi Komunikasi politik berbasis kearifan lokal yang terjadi di masyarakat adat Baduy, dimanifestasikan dalam proses penunjukkan *puun*. Hal itu terjadi di saat orang yang kesurupan arwah *karuhun* ‘nenek moyang’ Baduy menunjuk *puun* baru. Orang yang kesurupan ini juga memberi wejangan dan alasan-alasan dipilihnya seseorang menjadi *puun*. Karena menyangkut peristiwa politik, yaitu penunjukkan orang yang akan menduduki tampuk kekuasaan dalam suatu pemerintahan



*kapuunan*, maka proses ini termasuk ke dalam salah satu implementasi komunikasi politik.

Implementasi aktivitas komunikasi politik yang terkandung di dalam proses penunjukkan *jaro tangtu* terwujud dalam aktivitas komunikasi politik ketika *puun* memberikan jabatan kepada orang yang akhirnya dipercaya menjadi *jaro tangtu*. Komunikasi politik diimplementasikan dan berlangsung secara *face-to-face* dan dihadiri oleh para warga berpengaruh di kampung *tangtu* tersebut. Karena menyangkut pemerintahan dan pemberian kuasa, maka proses ini termasuk ke dalam aktivitas komunikasi politik berbasis kearifan lokal, yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Implementasi komunikasi politik berbasis kearifan lokal di masyarakat adat Baduy, proses penunjukkan *jaro tangtu* dan *jaro-jaro* lainnya secara garis besarnya hampir sama. Adapun aspek komunikasi politik yang terwujud dalam proses penunjukkan *jaro pamaréntah* terjadi ketika para *puun* memberi restu kepada calon *jaro pamaréntah* untuk menjabat sebagai Kepala Desa Kanekes. *Jaro pamaréntah* diberikan wewenang dan kuasa untuk menjembatani Baduy dengan pihak luar, dalam hal ini pemerintah. Para *puun* memberikan kedaulatan penuh kepada *Jaro pamaréntah* sebagai pemimpin wilayah Baduy yang bersifat formal, sebagai Kepala Desa Kanekes.

Proses pemilihan *kokolot lembur*, para *kolot* melakukan *gempungan* 'pertemuan, berunding' atau diskusi bersama, sebagai perwujudan dari komunikasi politik. Pendapat *kolot* atau tertua paling dihormati, dan yang akan diambil, istilahnya "*milu ka nu kolot*". Setelah *kokolot lembur* ini terpilih, ia akan melaporkan ke para *puun* melalui *jaro tangtu*. Jadi, aktivitas komunikasi politik yang terjadi bersifat *bottom-up*.

Komunikasi politik berbasis kearifan lokal yang diimplementasikan dalam keempat peristiwa di masyarakat adat Baduy, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang komunikasi politik yang terjadi di tengah salah satu masyarakat adat yang masih eksis hingga saat ini, dan sebaiknya dipertahankan. Implementasi komunikasi politik berbasis kearifan lokal seperti yang dilaksanakan di masyarakat adat Baduy yang berlandaskan kekeluargaan, niscaya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat akan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahidin, U., Handayani, R., & Suraya, A. (2018). Penyuluhan Manajemen Informasi dengan
- Mempertahankan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Suku Baduy. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(1), 1–10. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpdl/article/view/1685>
- Amaliyah, E. I. (2018). Masyarakat Baduy dalam Pergulatan Tiga Jaringan Makna. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 313–326. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i2.1294>
- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Indeks.
- Arif, A., Marini, A., & Utomo, E. (2021). Character Education in Baduy Tribe Communities in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(4), 646–653. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/2626>
- AS, E., Aliyudin, M., Nurdin, F. S., Laksana, M. W., Muslimah, S. R., & Azis, W. D. I. (2020). Sunda Wiwitan: The Belief System of Baduy Indigenous Community, Banten, Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 5(1), 77–95. <https://doi.org/10.15575/jw.v5i1.8069>
- Garna, J. K. (2009). *Metoda Penelitian: Kualitatif*. Primaco Akademika.
- Harun, R., & AP., S. (2006). *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Mandar Maju.
- Heriyanto, Manggong, L., & Sumarlina, E. S. N. (2019). Baduy Cultural Tourism: An Ethnolinguistic Perspective. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 4(2), 198–205. <https://doi.org/10.22161/ijels.4.2.1>
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi: Konsep, Pedoman dan Contoh Penelitian*. Widya Padjadjaran.
- Mahpudin. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 113–128. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.9035>
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Remaja



- Rosdakarya.  
8(2), 253–264.  
<https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.25671>
- Nurussaadah, E., & Sumartias, S. (2017). Komunikasi politik PKS dalam keterbukaan ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 43–52.  
<https://doi.org/10.24198/jkk.v5i1.8522>
- Pace, R. W., & Faules, D. F. (2006). *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Permana, R. S. M. (2015). Makna Tri Tangtu Di Buana yang Mengandung Aspek Komunikasi Politik dalam Fragmen Carita Parahyangan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(2), 173–191.  
<https://doi.org/10.24198/jkk.vol3n2.8>
- Permana, R. S. M., Sumarlina, E. S. N., & Darsa, U. A. (2020). Konsep “Parigeuing” dalam konteks kepemimpinan dan komunikasi politik berdasarkan naskah Sunda kuno. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(2), 253–264.  
<https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.25671>
- Sobarna, C., & Afsari, A. S. (2020). Pola Nama pada Masyarakat Baduy. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 9(2), 287–300.  
<https://doi.org/10.26499/rnh.v9i2.2939>
- Sumarlina, E. S. N. (2016). *Baduy: Masa Kini, Antara Konvensi dan Inovasi*. SituSeni.
- Sumarlina, E. S. N., & Permana, R. S. M. (2019). Komunikasi Politik dan Budaya Damai di Zaman Galuh Pakuan dalam Konstelasinya di Masa Kini. *LOKABASA: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Budaya Daerah Serta Pengajarannya*, 10(1), 34–42.  
<https://doi.org/10.17509/jlb.v10i1.16930>
- Syarbini, A. (2015). Kearifan Lokal Baduy Banten. *Refleksi*, 14(1), 55–74.  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/9577>